





(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARPIN RIZALDI

2. Jabatan : HAKIM TINGGI

3. NHK : 16940

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 16.675.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/120 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 454 m2/170 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 1007 m2/354 m2 di KOTA
 PARIAMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.200.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/500 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.200.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
- 6. Tanah Seluas 19879 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- Tanah Seluas 19879 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- 8. Tanah Seluas 19968 m2 di KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
- 9. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/200 m2 di KOTA PEKANBARU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.295.000.000

- 1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- 2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI





Rp. 275.000.000

- MOBIL. TOYOTA VELLFIRE MINIBUS Tahun 2010. HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
- MOBIL, BMW X-5 SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
- MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.031.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	5.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	292.099.586
F. HARTA LAINNYA	Rp.	TOK TOH
Sub Total	Rp.	19.298.599.586
III. HUTANG	Rp.	at at
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.298.599.586

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 31 Januari 2020.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.